

STRATEGI PENANGANAN SANITASI DI PERMUKIMAN KUMUH DENGAN PENDEKATAN PARTISIPASI *STAKEHOLDER* (STUDI KASUS KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT)

**DAVID CHRISTIAN HUTAGAOL¹, PRAYATNI SOEWONDO^{1*}, DION AWFA²,
AHMAD SOLEH SETIYAWAN¹, PRASANTI WIDYASIH SARLI¹,
NICO HALOMOAN^{1,3}**

1. Program Magister Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung
 2. Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera
 3. Program Studi Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional Bandung
- *Email: prayatni@itb.ac.id

ABSTRAK

Kebutuhan akan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan dan mendorong peningkatan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan program sanitasi di Indonesia. Kota Bima sebagai lokasi studi dengan permasalahan sanitasi perlu didukung oleh stakeholder. Penelitian ini dapat melengkapi dokumen yang sudah dibuat. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran atau mixed method yang dilakukan secara kualitatif pada metode Stakeholder Analysis (SA) dan metode kuantitatif pada metode Social Network Analysis (SNA). Stakeholder Analysis dilakukan dengan focus group discussion (FGD) sedangkan Social Network Analysis dilakukan berdasarkan kuesioner yang diisi oleh peserta FGD saat acara FGD berlangsung. Hasil rangkaian penelitian di Kota Bima: teridentifikasi 52 stakeholder yang memiliki kepentingan terkait sanitasi di permukiman kumuh; terpetakan ada 8 key actors, 7 important actors, 6 interested actors, dan 9 additional actors; teridentifikasi 4 influential stakeholders yang juga adalah key actors. Secara umum kekohesifan (density) semua jenis kerja sama pada Kota Bima tidak cukup baik, yaitu 7,7%. Diperlukan peningkatan kerja sama dengan Perusahaan Swasta, Masyarakat, dan Akademisi untuk penanganan sanitasi di permukiman kumuh Kota Bima.

Kata kunci: sanitasi, kawasan kumuh, stakeholder analysis, social network analysis, Kota Bima

ABSTRACT

The need for sanitation is one of the basic human needs as part of efforts to protect health and encourage economic improvement to increase the capacity of district/city governments to implement sanitation programs in Indonesia. Bima City as a study location with sanitation problems needs to be supported by stakeholders. This research was carried out using mixed methods which were generally carried out qualitatively using the Stakeholder Analysis (SA) method and quantitatively using the Social Network Analysis (SNA) method. Stakeholder Analysis was carried out using a focus group discussion (FGD) while Social Network Analysis was carried out based on a questionnaire filled out by FGD participants during the FGD event. The results of research series in Bima City: identified 52 stakeholders who have an interest in sanitation in slum settlements; there are 8 key actors, 7 important actors, 6 interested actors, and 9 additional actors; there are 4 influential stakeholders who are also key actors. In general, the cohesiveness (density) of all types of cooperation in Bima City is not good enough, namely 7.7%. There is a need to increase cooperation with private companies, communities and academics to handle sanitation in Bima City slums.

Keywords : sanitation, slum area, stakeholder analysis, social network analysis, Bima City

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan dan mendorong peningkatan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut bersepakat untuk mengupayakan pemenuhan akses terhadap sanitasi layak sebesar 100% dan 0% buang air besar sembarangan (BABS) hingga tahun 2030 dengan mengupayakan pemenuhan akses sanitasi seperti yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Upaya peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan program sanitasi di Indonesia dapat menghasilkan peningkatan yang substansial (Odagiri dkk., 2020). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategi yang tepat sasaran di masing-masing kota sebagai bagian upaya pemenuhan akses sanitasi.

Data Capaian Sanitasi Aman Nasional tahun 2021 (NAWASIS) menunjukkan daerah-daerah yang mencapai sanitasi aman hanya pada Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan seluruh provinsi Jawa dan Bali, dengan demikian, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk mendorong kemajuan pembangunan sistem sanitasi aman di provinsi-provinsi lainnya. Bank Dunia memilih tiga kota (Gambar 1): Kota Bima, Kota Manado, dan Kota Pontianak untuk menerima bantuan teknis untuk kajian ketangguhan terhadap bencana terkait air (Bank Dunia, 2020).



Gambar 1. Letak Geografis Kota Bima, Kota Manado, dan Kota Pontianak pada Peta Indonesia (sumber: Bank Dunia, 2020)

Kota Bima dipilih dalam penelitian ini karena secara geografis Kota Bima dapat mewakili bagian Selatan Indonesia. Kota Bima dapat mewakili kota-kota kecil yang sedang berkembang. Tentunya kota Bima juga mengalami proses urbanisasi yang bukan tidak mungkin kurang diimbangi dengan ketersediaan permukiman yang layak sehingga menimbulkan kawasan permukiman kumuh (Halomoan dkk., 2022). Kota Bima juga telah menerima bantuan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) untuk pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) sejak tahun 2021 (BAPPEDA NTB, 2021), penelitian ini dapat melengkapi dokumen yang sudah dibuat.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi *stakeholder* yang berperan sebagai aktor kunci, aktor penting, subjek, dan aktor tambahan dalam penanganan sanitasi di permukiman kumuh.
2. Menganalisis hubungan atau jaringan sosial (*Social Network Analysis*, SNA) antar *stakeholder* untuk penanganan sanitasi pada permukiman kumuh.

3. Merekomendasikan hubungan kerja sama antar *stakeholder* untuk penanganan sanitasi pada permukiman kumuh.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran atau *mixed method* yang secara umum dilakukan secara kualitatif pada *Stakeholder Analysis* (SA) dan metode kuantitatif pada SNA. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Identifikasi *Stakeholder* Awal

Identifikasi *stakeholder* awal dilakukan dengan cara mempelajari *stakeholder* yang teridentifikasi pada riset sebelumnya (Gusmiati, 2022) dan mempelajari referensi yang relevan terkait *stakeholder* dalam bidang sanitasi.

Merancang kuesioner

Kuesioner dirancang menjadi 2 bagian. Bagian pertama untuk mengetahui persepsi pribadi para *stakeholder* terkait *stakeholder* mana saja yang memiliki pengaruh/*power* dan minat/*interest* terhadap penanganan sanitasi di permukiman kumuh beserta posisi masing-masing *stakeholder* pengisi kuesioner sesuai tingkat pengaruh dan minat mereka terhadap penanganan sanitasi di permukiman kumuh. Bagian dua kuesioner berfungsi untuk memetakan kerja sama dan jenis kerja sama yang ada di antara para *stakeholder*. Kuesioner dibagikan saat acara FGD dan diisi selama rangkaian acara FGD berlangsung.

Stakeholder Analysis (SA)

Stakeholder Analysis dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Di dalam FGD, ada dua hal yang dilakukan, yaitu mengidentifikasi *stakeholder* yang belum teridentifikasi pada tahap sebelumnya dan mengisi matriks *power-interest*. Menurut Lienert dkk., (2013), pengidentifikasian *stakeholder* adalah proses iteratif yang digambarkan dengan metode yang kaya, salah satunya dengan *focus group discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan alat bantuan *Google Jamboard*. Pada papan *virtual Google Jamboard* pertama (Gambar 2) diisi nama-nama *stakeholder* pemerintah pada kertas nama *virtual* berwarna biru.



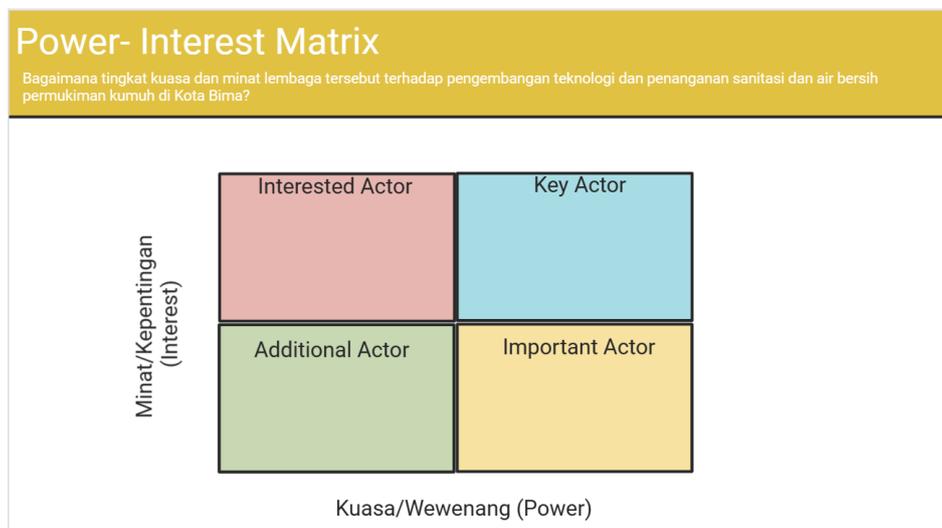
Gambar 2. Papan *Virtual Google Jamboard* Identifikasi *Stakeholder* Pemerintah

Proses dilanjutkan dengan pengisian nama-nama *stakeholder* pada papan *virtual* kedua (Gambar 3). *Stakeholder* sektor swasta diisi pada kertas nama *virtual* berwarna merah jambu, *stakeholder* masyarakat sipil diisi pada kertas nama *virtual* berwarna hijau, dan *stakeholder* akademisi diisi pada kertas nama *virtual* berwarna jingga.

Para peserta FGD diminta untuk menjelaskan perannya masing-masing terhadap penanganan sanitasi di permukiman kumuh, setelah itu, peserta diminta untuk meletakkan kertas nama virtual masing-masing *stakeholder* dalam matriks *power-interest* (Gambar 4). Para peserta FGD dapat mengomentari proses peletakkan posisi masing-masing *stakeholder* pada matriks *power-interest* sehingga mencapai konsensus.



Gambar 3. Papan *Virtual Google Jamboard* Identifikasi *Stakeholder* Sektor Swasta, Masyarakat Sipil, Dan Akademisi



Gambar 4. Papan *Virtual Google Jamboard* Matriks *Power-Interest*

Social Network Analysis (SNA)

Salah satu hubungan yang dapat dianalisis dengan SNA adalah hubungan kerja sama (Knoke dan Yang, 2008). Berdasarkan *enabling environment* (Luthi dkk., 2011), ditentukan empat aspek kepentingan yang dapat dipakai untuk menentukan hubungan para *stakeholder* (SNA), yaitu : i. informasi ; ii. regulasi ; iii. implementasi (teknis) ; dan iv. Finansial. Data dari kuesioner fisik didigitalisasi ke dalam program *Microsoft Excel* kemudian data tersebut diolah menjadi matriks biner untuk keperluan analisis selanjutnya menggunakan program UCINET 6.759 dan NETDRAW. Matriks biner berisi besaran hubungan antar *stakeholder*, angka 1 untuk menandakan adanya hubungan dan 0 untuk menandakan tidak adanya hubungan. Pada program UCINET 6.759 matriks biner disimpan dalam bentuk *file ##d* dan *##h*.

Matriks biner kemudian dianalisis dengan fungsi *degree centrality* dan *density* pada program UCINET 6.759. *Degree centrality* menunjukkan tingkat keterpusatan atau kepopuleran *stakeholder* dalam jaringan kerja sama. *Outdegree* menunjukkan hubungan yang keluar dari *stakeholder*, sedangkan *indegree* menunjukkan hubungan ke dalam/menuju *stakeholder*. Semakin besar total *outdegree* dan *indegree* pada *stakeholder* menunjukkan *stakeholder* tersebut semakin *influential* atau berpengaruh. Semakin kecil total *degree*-nya, menunjukkan *stakeholder* sebagai *stakeholder* periferal atau kecil pengaruhnya. *Density* adalah pengukuran tingkat kekohesifan jaringan (Borgatti dkk., 2018).

Matriks biner kemudian diolah menjadi bentuk grafik menggunakan NETDRAW yang terintegrasi dengan program UCINET 6.759 itu sendiri. Proses penggambaran mencakup memodifikasi besar titik *stakeholder* menjadi sesuai dengan jumlah *degree* masing-masing *stakeholder*. Kemudian warna masing-masing *stakeholder* disesuaikan dengan warna peran *stakeholder* seperti pada tahap SA. Selanjutnya penempatan masing-masing *stakeholder* disusun sesuai kelompok peran *stakeholder*. Gambar jaringan disimpan dalam bentuk .png.

Analisis Deskriptif pada Hasil Penelitian

Hasil SA dan SNA dianalisis dan dibahas secara deskriptif dengan membandingkan literatur dan peraturan yang ada. Kategori para *stakeholder* dievaluasi apakah sudah sesuai dengan yang ideal. Hubungan kerja sama para *stakeholder* dievaluasi apakah ada yang perlu diperbaiki agar penanganan sanitasi di permukiman kumuh masing-masing kota dapat ditingkatkan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Stakeholder

Berikut pada Tabel 1 adalah para *stakeholder* yang diidentifikasi penulis sebelum FGD (Gusmiati, 2022 dan penelusuran internet), saat FGD, dan pengisian kuesioner SNA untuk Kota Bima.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Stakeholder Kota Bima

No.	Stakeholder	Sebelum FGD	Saat FGD	Kuesioner SNA
Akademisi				
1	Pendidikan Biologi, STKIP Bima	■	■	■
2	Administrasi Publik, Universitas Mbojo	■	■	■
3	Teknik Lingkungan, Sekolah Tinggi Teknik Bima		■	■
4	STIE			■
Masyarakat				
5	RW 01 Kelurahan Sarae	■		■
6	RT 01 Kelurahan Sarae	■		■
7	RT 03 Kelurahan Sarae	■		■
8	RT 04 Kelurahan Sarae	■		■
9	RW 03 Kelurahan Paruga	■	■	■
10	RT 09 RW 03 Kelurahan Paruga	■		
11	RW 04 Kelurahan Paruga	■		
12	RT 12 RW 04 Kelurahan Paruga	■		
13	Perwakilan Masyarakat Kelurahan Sarae	■		
14	Perwakilan Masyarakat Kelurahan Paruga	■		

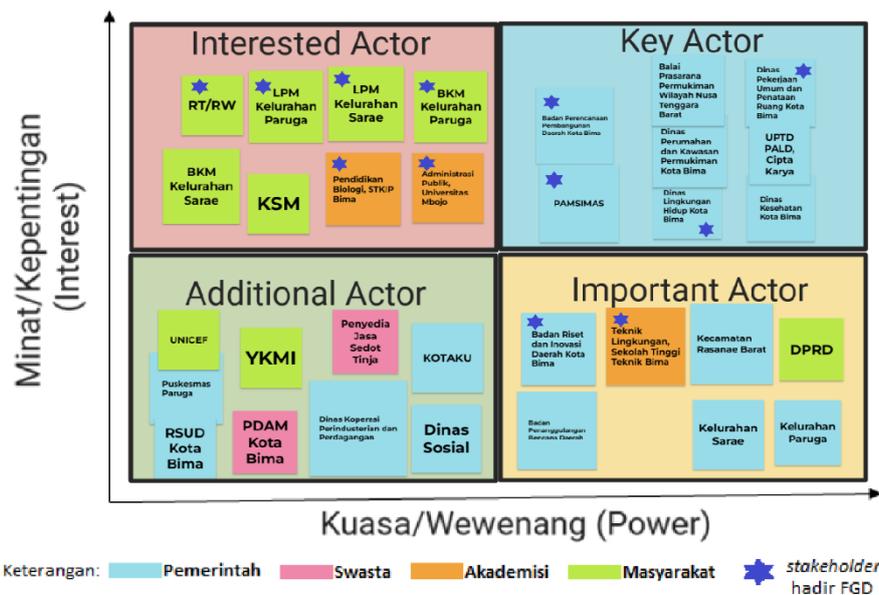
*Strategi Penanganan Sanitasi di Permukiman Kumuh dengan Pendekatan Partisipasi Stakeholder
(Studi Kasus Kota Bima, Nusa Tenggara Barat)*

No.	Stakeholder	Sebelum FGD	Saat FGD	Kuesioner SNA
15	LPM Kelurahan Paruga	■	■	
16	LPM Kelurahan Sarae	■	■	
17	BKM Kelurahan Paruga	■	■	■
18	BKM Kelurahan Sarae	■	■	
19	KSM		■	■
20	LSM	■		■
21	UNICEF		■	
22	YKMI		■	■
23	DPRD		■	
24	FTSB (LSM)			■
25	PTTB (LSM)			■
Pemerintah				
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat			■
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat			■
28	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat			■
29	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat			■
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	■	■	■
31	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima	■	■	■
32	Dinas Kesehatan Kota Bima	■	■	■
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima	■	■	■
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima	■	■	■
35	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	■	■	■
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima	■	■	■
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima		■	
38	Kecamatan Rasanae Barat	■	■	■
39	Kecamatan Asakota			■
40	Kecamatan Mpunda			■
41	Kelurahan Sarae	■	■	■
42	Kelurahan Paruga	■	■	■
43	Konsultan (KOTAKU)	■	■	■
44	Puskesmas Paruga	■	■	■
45	Puskesmas Asakota			■
46	RSUD Kota Bima	■	■	■
47	Dinas Sosial		■	
48	PAMSIMAS		■	■
49	UPTD PALD, Cipta Karya		■	
50	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan		■	
Swasta				
51	PDAM Kota Bima	■	■	■
52	Penyedia Jasa Sedot Tinja	■	■	■

Hasil Stakeholder Analysis (SA)

Masing-masing narasumber (*stakeholder*) yang hadir diminta untuk menjelaskan peran *stakeholder* terhadap penanganan sanitasi di permukiman kumuh, setelah itu, peserta FGD diminta untuk meletakkan posisi mereka pada matriks berdasarkan kuasa dan kepentingan

mereka untuk penanganan sanitasi permukiman kumuh masing-masing Kota Manado dan Kota Bima. Hasil konsensus FGD untuk matriks kuasa-kepentingan Kota Bima dapat dilihat pada Gambar 5. Hasil konsensus *power-interest* matriks, untuk penanganan sanitasi di permukiman kumuh Kota Bima terdapat 8 *key actors*, yaitu: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima, 2) PAMSIMAS, 3) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, 5) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 7) UPTD PALD Cipta Karya, dan 8) Dinas Kesehatan Kota Bima. *Key actors* didominasi oleh pemerintah. Pihak swasta masih berupa *additional actor*. Masyarakat cenderung memiliki kepentingan (*interest*) dalam sanitasi, tetapi kurang memiliki kuasa. Terkecuali RT 04 Sarae yang berpersepsi bahwa beliau memiliki kuasa yang tinggi juga untuk penanganan sanitasi. Sebagian masyarakat berpersepsi bahwa kurang adanya komunikasi antara mereka dengan pemerintah sehingga mereka kurang dapat mengelola fasilitas sanitasi dengan baik.



Gambar 5. Matriks Kuasa-Kepentingan Kota Bima

Tabel 2. Strategi kerja sama dengan *stakeholder* sesuai hasil Stakeholder Analysis (diadaptasi dari International Rescue Committee)

Interested actor: Tetap berinformasi	Key actor: Kelola dengan cermat
<ul style="list-style-type: none"> - Berkonsultasi pada poin-poin keputusan penting - Membangun kemitraan formal - Pembangunan kapasitas untuk meningkatkan pengaruh - Memberikan informasi tentang kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkonsultasi pada poin-poin keputusan penting - Membangun kemitraan formal - Melakukan penilaian bersama - Mengadakan rapat koordinasi secara berkala
Additional actor: Pantau	Important actor: Pertahankan kepuasan
<ul style="list-style-type: none"> - Memantau potensi dampak negatif dari pelaku - Bekerja sama dengan aktor pendukung lainnya untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kembangkan strategi advokasi untuk mendapatkan dukungan mereka - Berkonsultasi atau terlibat dalam aktivitas kunci - Bekerja dengan aktor lain untuk mempengaruhi mereka

Temuan menarik lainnya adalah pada posisi KOTAKU. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencapai kota layak huni, produktif dan berkelanjutan (KOTAKU, 2016). Di Kota Bima KOTAKU hanya sebagai *additional actor*. Ini menunjukkan bahwa para stakeholder yang hadir tidak merasa adanya hubungan kerja sama yang dijalin dengan program KOTAKU di

Kota Bima. Hal yang serupa ditemukan untuk stakeholder Puskesmas. Di Kota Bima Puskesmas menempati kategori *additional actor*. Hal ini juga membuktikan kurangnya pengetahuan atau hubungan kerja sama antar *stakeholder* untuk penanganan sanitasi di permukiman kumuh Kota Bima. Menurut dokumen yang diterbitkan *International Rescue Committee* (2016), berikut pada Tabel 2 adalah strategi kerja sama dengan *stakeholder* yang sudah diidentifikasi dalam *Stakeholder Analysis*.

Hasil SNA

Berikut adalah hasil pengolahan grafik sosiogram untuk empat aspek kepentingan yang dipakai untuk menentukan hubungan para stakeholder dengan hasil analisis *degree centrality*, *density*, serta analisis deskriptif yang mengacu pada peraturan atau literatur yang ada.

a. Informasi

Seperti yang divisualisasikan pada Gambar 6a, untuk kerja sama informasi antar *stakeholder* Kota Bima, *stakeholder* yang paling populer atau *influential* yang teridentifikasi adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bima dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. *Density* 10,3% menunjukkan kurang kohesifnya hubungan informasi antar *stakeholder* (Kurniawan dkk., 2020).

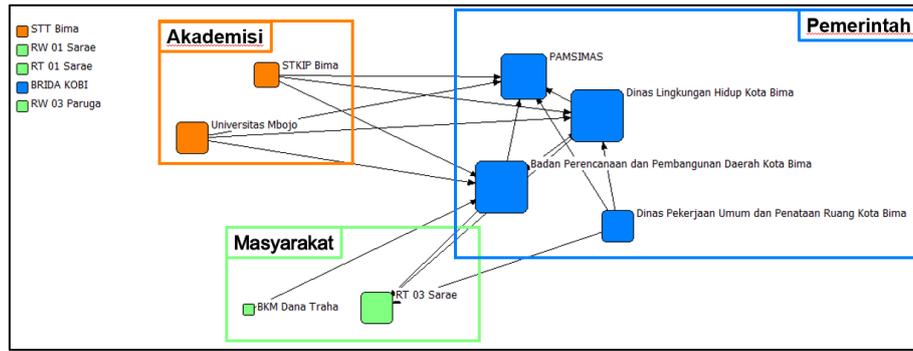
b. Regulasi

Seperti yang divisualisasikan pada Gambar 6b, untuk kerja sama regulasi antar *stakeholder* Kota Bima, *stakeholder* yang paling populer atau *influential* yang teridentifikasi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dan PAMSIMAS. *Density* 8,3% menunjukkan kurang kohesifnya hubungan regulasi antar *stakeholder*. Mengacu pada Perpres Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, ada temuan menarik yang menggambarkan belum siapnya kerangka regulasi nasional yang mengatur hubungan kerja sama antara *stakeholder* urusan sanitasi untuk mendukung kualitas pelayanan sanitasi masing-masing kota, khususnya hubungan dengan pihak swasta dan masyarakat. Pada Pasal 4 dan 5 diatur Standar Kualitas Air Minum. Pasal 4 ayat 2 berisi: Pemerintah melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan standar kualitas air minum. Pasal 5 mengatur pengawasan terhadap kualitas air minum dengan pengawasan eksternal: perusahaan daerah air minum, depot air minum, penyedia air minum berbasis masyarakat, badan usaha swasta penyedia air minum, dan SPAM bukan jaringan perpipaan milik masyarakat, sedangkan untuk Standar Kualitas Sanitasi hanya dijelaskan bahwa pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar teknis dan hasil olahan infrastruktur sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan. Tidak ada strategi bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, dan pengawasan eksternal seperti pada air minum.

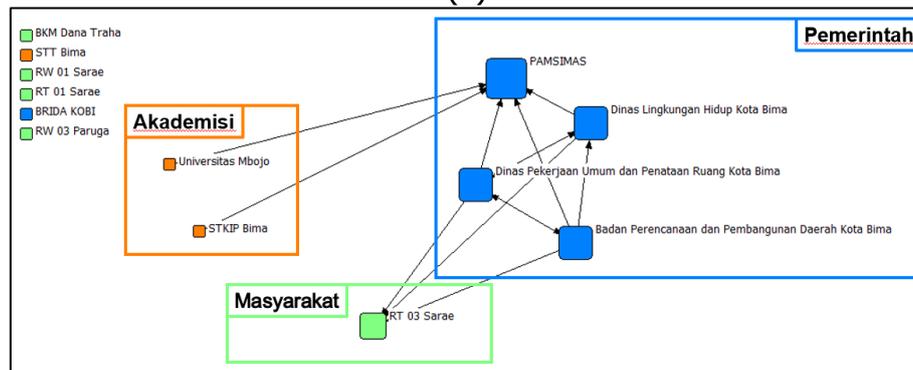
c. Implementasi

Seperti yang divisualisasikan pada Gambar 6c, untuk kerja sama implementasi antar *stakeholder* Kota Bima, *stakeholder* yang paling populer atau *influential* yang teridentifikasi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, dan PAMSIMAS. *Density* 9,6% menunjukkan kurang kohesifnya hubungan implementasi antar *stakeholder*. BAPPEDA Kota Bima baru membuat pemutakhiran SSK tahun 2020-2024 pada pertengahan tahun 2021 dengan bantuan UNICEF, kemungkinan besar SSK tahun 2020-2024 yang disusun sebelumnya kurang implementatif.

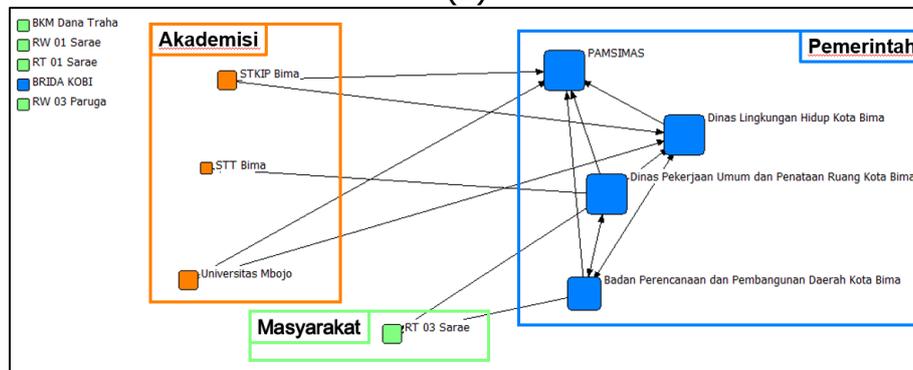
Strategi Penanganan Sanitasi di Permukiman Kumuh dengan Pendekatan Partisipasi Stakeholder (Studi Kasus Kota Bima, Nusa Tenggara Barat)



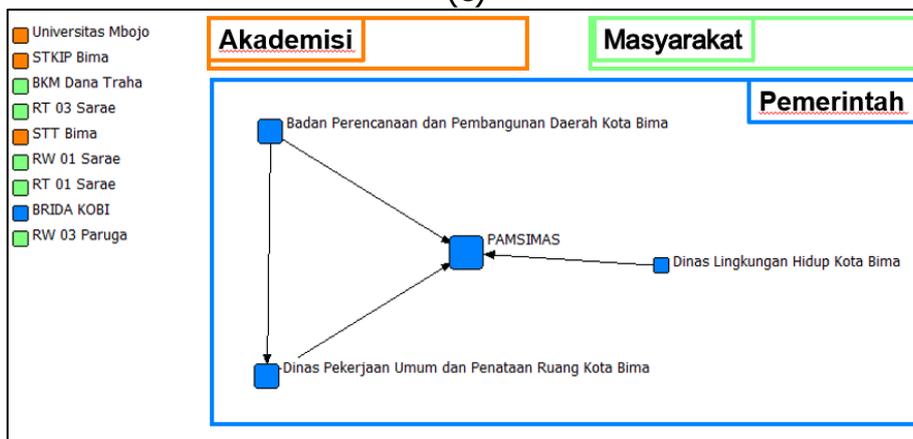
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 6. Sosiogram Hubungan Kerja Sama (a) Informasi ; (b) Regulasi ; (c) Implementasi, dan (d) Finansial Antar *Stakeholder* Kota Bima

d. Finansial

Seperti yang divisualisasikan pada Gambar 6d, untuk kerja sama finansial antar *stakeholder* Kota Bima, *stakeholder* yang paling populer atau *influential* yang teridentifikasi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bima, dan PAMSIMAS. *Density* 2,6% menunjukkan kurang kohesifnya hubungan finansial antar *stakeholder*. Tidak ditemukan kerja sama finansial dengan *stakeholder* swasta. Pihak swasta (penyedia jasa sedot tinja) tidak hadir pada FGD sehingga sama sekali tidak ada dot *stakeholder* swasta pada keempat sosiogram. Berdasarkan informasi yang didapat saat FGD, pihak swasta juga belum dikelola Pemerintah Kota Bima. Walaupun sudah ada IPLT di Kota Bima, penyedia jasa sedot tinja masih membuang hasil sedot tinjanya sembarangan. Salah satu penyedia sedot tinja yang nomor kontakunya ada di tembok-tembok permukiman kumuh Sarae, Kota Bima, ketika dihubungi mengakui bahwa hasil sedot tinjanya dibuang ke laut.

Hasil Analisis Gabungan SA dan SNA

Secara umum hasil identifikasi *key stakeholder* dengan metode FGD SA pada Kota Bima sejalan dengan identifikasi *influential stakeholder* dengan metode kuesioner SNA. Berikut pada Tabel 3 adalah ringkasan hasil identifikasi *key actor* yang juga merupakan *influential stakeholder* pada Kota Bima.

Tabel 3. Hasil identifikasi *key actor* yang juga merupakan *influential stakeholder* pada Kota Bima

Key actor Kota Bima		Influential Stakeholder
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima		✓
PAMSIMAS		✓
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima		✓
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima		✓
UPTD PALD Cipta Karya		
Dinas Kesehatan Kota Bima		

Tabel 4. Kerja sama antar stakeholder yang mungkin dibentuk untuk penanganan sanitasi di permukiman kumuh (diadaptasi dari Strande dkk., 2014)

<i>Stakeholder</i>	Keterlibatan Kegiatan							
	Hukum	Koordinasi	Pengumpulan & Transportasi	Pengolahan	Pemulihan Sumber Daya	Penegakan Hukum	Pelatihan & Informasi	Pemantauan
Jenis Kerja Sama*	Reg	Inf	Imp; Fin	Imp; Fin	Imp; Fin	Reg; Fin	Imp; Inf	Inf
Pemerintah	■	■	■	■	■	■	■	■
Perusahaan Swasta			■	■	■			
Masyarakat		■			■	■	■	■
Akademisi							■	■

*Inf = Informasi Reg = Regulasi Imp = Implementasi Fin = Finansial

Peran *Stakeholder* dan kerja sama yang mungkin dibentuk

Untuk mencapai akses sanitasi aman diperlukan kerja sama antar *stakeholder*. Dengan kapasitas pemerintah yang ada sekarang di Kota Bima pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan peningkatan kerja sama dengan Perusahaan Swasta, Masyarakat, dan Akademisi untuk penanganan sanitasi di permukiman kumuh Kota Bima. Hal ini sejalan dengan SSK Kota Bima. Salah satu strategi pengembangan air limbah domestik tertulis: "Strategi Meningkatkan Sosialisasi dan Kampanye terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik yang tujuan meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang layak dan terciptanya masyarakat yang berwawasan lingkungan." (Pokja Sanitasi Kota Bima, 2021). Tabel 4 menunjukkan kerja sama yang mungkin dibentuk.

4.KESIMPULAN

Hasil rangkaian penelitian di Kota Bima: teridentifikasi 52 *stakeholders* yang memiliki kepentingan terkait sanitasi di permukiman kumuh; terpetakan ada 8 *key actors*, 7 *important actors*, 6 *interested actors*, dan 9 *additional actors*; 4 *influential actors* yang juga adalah *key actors*. Secara umum kekohesifan (*density*) semua jenis kerja sama pada Kota Bima tidak cukup baik, yaitu 7,7%. Secara umum hasil identifikasi *key stakeholder* dengan metode FGD pada kota Bima sejalan dengan identifikasi *influential stakeholder* dengan metode kuesioner SNA. Diperlukan peningkatan kerja sama dengan Perusahaan Swasta, Masyarakat, dan Akademisi untuk penanganan sanitasi di permukiman kumuh Kota Bima.

PERSANTUNAN

Terima kasih kepada Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) yang mendukung penelitian ini melalui program Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE). Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima yang membantu saat FGD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2020). Membangun Kota Tangguh Banjir – pendekatan terpadu untuk pembangunan berkelanjutan Bima, Manado, dan Pontianak, September 2020.
- Borgatti, S.P., Everett, M.G., dan Johnson, J.C., (2018). *Analyzing Social Networks*, Sage Publications, 2nd Edition.
- Fardianto, F. (2021). Zoom Meeting Pemutakhiran Dokumen SSK Kota Bima tahun 2020-2024, <https://bappeda.ntbprov.go.id/zoom-meeting-pemuthakiran-dokumen-ssk-kota-bima-tahun-2020-2024/> (diakses pada tanggal 19 Juli 2023).
- Gusmiati. (2022). Analisis Sosio-Kultur dan Partisipasi Masyarakat pada Kawasan Kumuh Bantaran Sungai terhadap Konsep Pembangunan Sanitasi Berkelanjutan (Studi Kasus: Kota Bima, Nusa Tenggara Barat), Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Halomoan, N., Soewondo, P., Sarli, P. W., Setiyawan A. S. (2022). Air dan Sanitasi Kawasan Kumuh – Tinjauan di Kota Bima, Manado dan Pontianak, Resilient Indonesian Slum Envisioned (RISE).
- International Rescue Committee. (2016). Stakeholder and Social Network Analysis – Guidance Note. www.rescue.org (diunduh pada tanggal 28 Mei 2023).
- Knoke, David dan Song Yang. (2008). *Social Network Analysis*, Sage Publications, 2nd Edition

- Kurniawan, D., Iriani, A., Manongga, D. (2020), Pemanfaatan Social Network Analysis (SNA) untuk Menganalisis Kolaborasi Karyawan pada PT. Arum Mandiri Group, *Transformatika*, Vol.17, No.2, Januari 2020, pp. 149 – 159.
- Lienert, J., Schnetzer, F., dan Ingold, K. (2013). Stakeholder analysis combined with social network analysis provides fine-grained insights into water infrastructure planning processes, *Journal of Environmental Management*, 125, 134-148.
- Luthi, C., A. Morel, E. Tilley, L. Ulrich (2011). *Community-Led Urban Environmental Sanitation, Complete Guidelines for Decision-Makers with 30 Tools*, Dubendorf, Switzerland, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG).
- NAWASIS. (2021). Capaian Akses Sanitasi Aman 2021, <https://www.nawasis.org/portal/galeri/read/capaian-akses-sanitasi-aman-2021/52472> (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022).
- Odagiri, M., Aidan A. C., Thomas, A., Kurniawan, M. A., Zainal, M., Setiabudi, W., Gnilo, M.E., Badloe, C., Virgiyanti, T. D., Nurali, I.A., Wahanudin, L., Mardikanto, A., Pronyk, P., (2020). Achieving the Sustainable Development Goals for water and sanitation in Indonesia – Results from a five-year (2013–2017) large-scale effectiveness evaluation, *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, Volume 230, 113584.
- Sekretaris Negara (2014), Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- Pokja Sanitasi Kota Bima. (2021). *Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota – Kota Bima 2021-2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tingkat Desa/Kelurahan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- Strande, L., M. Ronteltap, dan D. Brdjanovic. (2014). *Faecal Sludge Management: Systems Approach for Implementation and Operation*, IWA, London.